

# ISU PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK SURIAH

Adirini Pujayanti\*)



## Abstrak

*Tim inspeksi PBB menemukan bukti penggunaan senjata kimia gas sarin dalam serangan di Ghouta, Damaskus, 21 Agustus 2013, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Pihak Barat dan negara-negara Arab yang didukung kelompok HAM independen menyatakan senjata tersebut milik Pemerintah Assad. Namun Pemerintahan Assad yang didukung Rusia, menuduh serangan tersebut dilakukan oleh pihak oposisi. Laporan tim inspeksi PBB menjadi kunci untuk menekan Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil langkah tegas, termasuk menyetujui serangan militer terhadap Suriah dan melengserkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Indonesia tegas menyatakan sikapnya, solusi politik perlu dikedepankan untuk mengatasi krisis Suriah dan memastikan PBB jadi bagian dari solusi konflik Suriah.*

## A. Pendahuluan

Tim investigasi PBB memastikan penggunaan senjata kimia gas sarin skala besar dalam serangan senjata kimia di wilayah Ghouta, pinggiran kota Damaskus pada serangan 21 Agustus 2013 lalu. Penggunaan senjata kimia yang ditembakkan dari roket ke wilayah yang diduduki pihak oposisi menewaskan lebih dari 1.400 orang, yang 400 di antaranya anak-anak. PBB menyatakan, pembunuhan massal di Ghouta merupakan serangan senjata kimia terbesar saat ini. Investigasi PBB tersebut mengarah pada rezim Suriah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Secara terpisah, laporan tim Hak Asasi

Manusia (HAM) PBB menyatakan, telah terjadi 14 serangan senjata kimia di Suriah selama konflik yang berlangsung sejak Maret 2011. Pemerintahan Assad menolak tuduhan itu, dan menuduh kelompok oposisi yang melakukannya.

## B. Perbedaan Kebijakan AS-Rusia

Perbedaan sikap negara-negara Barat dan Rusia dalam penyelesaian senjata kimia Suriah di DK PBB semakin meruncing. Barat menuduh rezim Assad yang harus bertanggung jawab, namun Rusia meyakini kelompok oposisi yang menggunakannya. Kubu Barat di DK PBB yaitu AS, Perancis

\*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: apujayanti@yahoo.com



dan Inggris mengusulkan resolusi DK PBB dengan opsi serangan militer sesuai dengan Bab VII Piagam PBB. Sementara Rusia dan China tetap meminta dunia internasional berada di jalur diplomasi yang telah disetujui, tanpa ada kekerasan. Hal ini sesuai dengan Bab VI Piagam PBB yang mengedepankan perundingan. Pihak Rusia menyatakan hasil investigasi tersebut bias dan dipolitisasi karena tim inspeksi hanya mengambil sebagian bukti dan mengesampingkan tiga insiden sebelumnya. Ketegangan kedua pihak tersebut dipandang sebagai babak baru “Perang Dingin” antara AS dan Rusia.

Presiden Assad menegaskan akan bersikap kooperatif, namun AS harus lebih dahulu mencabut ancaman sanksi militer AS terhadap Suriah. Presiden Assad berjanji menyerahkan seluruh senjata kimia sesuai kesepakatan antara AS dan Rusia. Penyerahan senjata setidaknya membutuhkan waktu satu tahun. Upaya pengangkutan senjata tersebut juga membutuhkan dana sebesar US\$1 miliar karena merupakan operasi yang rumit dan sangat teknis. Rusia dan AS telah sepakat senjata kimia Suriah harus dimusnahkan pertengahan 2014 di bawah pengawasan internasional. Kedua negara sepakat Suriah harus memberikan data akurat tempat penyimpanan dan pembuatan senjata kimia. Suriah juga harus mengizinkan dan tidak menghalang-halangi kerja tim inspeksi senjata kimia PBB yang akan ke Suriah pada November 2013. Pada pertengahan tahun 2014, pelucutan dan pemusnahan senjata kimia harus sudah dilakukan.

Rusia mengusulkan proses empat langkah dalam prosedur serah terima senjata kimia tersebut. Rencana itu mengharuskan Suriah bergabung dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), menunjukkan lokasi penyimpanan senjata kimia mereka, mengizinkan tim inspeksi OPCW mengaksesnya dan mengatur penghancuran senjata tersebut. OPCW akan mendialogkan rencana dan langkah-langkah teknis pelucutan senjata kimia Suriah di Den Haag, Belanda. Melalui inisiatif ini, untuk sementara Rusia memegang kendali penyelesaian isu Suriah di kancah internasional.

Sebagai langkah kooperatif, Suriah telah berusaha bergabung dengan OPCW. Sekjen

PBB secara resmi menerima permohonan Suriah ke dalam OPCW. Presiden Assad telah menandatangani dekrit yang menyatakan bahwa Suriah akan menyetujui hukum internasional tentang larangan senjata kimia. Hal ini berarti Suriah secara resmi menyetujui hukum internasional yang melarang penggunaan senjata kimia dan Pemerintah Suriah berkomitmen untuk mengemban kewajiban konvensi internasional mengenai pelarangan senjata kimia. Namun belum ada kejelasan apakah Suriah telah memenuhi seluruh persyaratan hukum tambahan atas perjanjian internasional tersebut.

AS terus menegaskan Suriah harus mengikuti setiap kesepakatan untuk membawa persediaan senjata kimianya di bawah kontrol internasional secara kredibel dan dilaksanakan tepat waktu. AS telah memperingatkan Suriah untuk tidak menggunakan strategi mengulur waktu. Meski mayoritas rakyat AS menolak serangan militer ke Suriah, Presiden Obama tetap menyiapkan opsi serangan militer jika rencana Rusia untuk mengamankan dan memusnahkan senjata kimia rezim Assad gagal. Saat ini pasukan AS dan sekutunya telah berada di sekitar wilayah yang berdekatan dengan Suriah. Kapal perang AS serta negara pendukungnya dapat bergerak dengan cepat. Pangkalan militer mereka pun dapat difungsikan secara efektif.

### **C. Gas Sarin**

Berdasarkan kerangka resolusi DK PBB, Pemerintahan Assad harus menyerahkan daftar lengkap kepemilikan senjata kimia agar dapat diidentifikasi sebelum dihancurkan seluruhnya pada pertengahan 2014. DK PBB meminta Suriah untuk menyerahkan seluruh daftar lengkap kepemilikan senjata kimia berikut fasilitasnya. DK PBB akan meninjau kepatuhan Suriah terhadap resolusi ini dan mengusulkan agar pihak yang dicurigai sebagai pelaku serangan kimia diproses ke pengadilan pidana internasional dengan tuduhan kejahatan perang.

AS menilai Suriah memiliki 1000 ton senjata kimia beserta material pembuatnya yang ditempatkan di 45 lokasi. Dugaan bahwa Suriah memiliki sarin dalam jumlah besar sangat memprihatinkan masyarakat

internasional. Konvensi PBB tentang Senjata Kimia ditandatangani oleh 162 negara anggota, telah melarang pembuatan dan penimbunan senjata kimia, termasuk gas sarin. Ketentuan ini mulai berlaku pada 29 April 1997 dan menyerukan penghancuran semua stok senjata kimia tertentu pada April 2007.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Sarin 26 kali lebih mematikan daripada gas sianida. Hanya satu tetes sarin seukuran jarum sudah mampu membunuh manusia. Gas sarin merupakan cairan tidak berbau yang pada mulanya digunakan sebagai bahan pestisida. Sarin sangat mudah menguap selanjutnya uap sarin dapat menembus kulit. Sarin dapat mematikan meski pada konsentrasi sangat rendah. Apabila terhirup atau diserap melalui kulit, gas itu membunuh dengan melumpuhkan pusat pernafasan dari sistem saraf pusat dan melumpuhkan otot-otot sekitar paru-paru. Dalam waktu satu menit setelah menyerap gas, manusia akan menemui ajal karena tercekik akibat kelumpuhan otot pernafasan. Gas yang lebih berat dari udara itu dapat bertahan lama di suatu daerah, hingga enam jam, tergantung pada kondisi cuaca. Dalam perkembangannya zat ini digunakan sebagai senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal dalam Resolusi PBB Nomor 687.

#### **D. Masalah Pengungsi**

Ribuan warga sipil Suriah mengungsi ke luar negeri. Menurut PBB, hingga akhir Agustus 2013, jumlah pengungsi di Irak lebih kurang 200 ribu orang, 520 ribu di Yordania, dan 720 ribu orang di Lebanon, dan 464 ribu orang di Turki. Pemerintah Yordania menyatakan, pengungsi Suriah ke negaranya meningkat 10 kali lipat. Setiap hari rata-rata 900 orang. Sementara Italia telah menjadi negara tujuan para pengungsi Suriah di Eropa. Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi UNHCR, menyatakan jumlah warga Suriah yang mengungsi ke Italia terus meningkat. Dalam 40 hari telah tercatat sekitar 3.000 pengungsi Suriah telah tiba di Italia. Badan Pengungsi PBB UNHCR memperkirakan sebanyak 4.600 orang telah menyelamatkan diri dengan naik perahu ke pantai Italia sejak awal 2013.

Warga sipil terus menjadi sasaran perang. Saat ini lebih dari setengah juta orang masih terjebak di tengah pertempuran di pinggiran Damaskus. PBB menyerukan dihentikannya pertempuran Suriah dan mendesak akses kemanusiaan untuk warga sipil Suriah. Warga sipil tak dapat meninggalkan daerah mereka yang dikuasai oposisi atau pemerintah.

Dewan Gereja Dunia (WWC) menyerukan seluruh anggotanya untuk melobi pemerintah masing-masing guna mencari solusi damai. Upaya ini diharapkan dapat mengurungkan niat AS dan sekutunya untuk melakukan opsi militer kepada Suriah.

#### **E. Sikap dan Posisi Indonesia**

Pemerintah Indonesia mengancam penggunaan senjata kimia di Suriah. Masyarakat internasional harus bertindak agar situasi tidak semakin memburuk. Masyarakat internasional juga perlu memastikan agar pengguna senjata kimia bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia menegaskan perlunya peran utama PBB, khususnya DK PBB dalam menyelesaikan berbagai situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia mendukung upaya investigasi PBB terkait dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Terkait dengan konflik di Suriah, dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, bulan September 2013 ini, Indonesia memanfaatkan forum PBB tersebut untuk mendorong penyelesaian damai dan solusi politik dalam penyelesaian konflik di Suriah yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Dalam berbagai pertemuan, Menlu RI Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa Indonesia tegas menyatakan sikapnya soal solusi politik untuk mengatasi krisis Suriah. Intinya, memastikan bagaimana PBB jadi bagian dari solusi konflik Suriah. Posisi Indonesia jelas, yakni mendesak dunia internasional menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sekjen PBB Ban Ki-moon, dalam pembukaan Sidang Majelis Umum, juga mendesak para pemimpin dunia mengedepankan perdamaian ketimbang pertumpahan darah.

Sikap Indonesia sesungguhnya berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Sebagai langkah implementasi, Indonesia menawarkan solusi damai dalam penyelesaian masalah di Suriah, tanpa harus mengerahkan kekuatan militer. Sikap Indonesia, yang pada utamanya adalah agar AS dan sekutunya tidak terburu-buru melakukan langkah militer yang kemudian imbasnya merugikan dunia secara luas. Sikap politik luar negeri Indonesia itu dituangkan dalam tiga langkah kebijakan, yaitu melakukan gencatan senjata, memberikan akses bantuan kemanusiaan dan penyelesaian proses politik. Indonesia berharap, di tengah semakin meningkatnya ketegangan, ada semacam harapan bahwa upaya diplomasi masih dapat dikedepankan.

## F. Penutup

Situasi Suriah yang terus memburuk dan membahayakan warga sipil menjadi keprihatinan dunia. DPR-RI dapat meminta pemerintah untuk terus berpartisipasi aktif mencari solusi damai bagi Suriah. Pemerintah Indonesia juga harus secara aktif mendukung upaya PBB untuk menyelesaikan krisis Suriah secara damai. Selain itu mengingat dampaknya yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia, Indonesia secara aktif harus juga berpartisipasi membantu PBB dalam upaya pemusnahan senjata kimia di Suriah secara khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya.

Hal mendesak lain yang juga harus menjadi perhatian DPR-RI adalah meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai upaya evakuasi WNI di Suriah. Saat ini situasi di Suriah telah semakin memburuk, selain ancaman perang senjata kimia antara pemerintah dan pihak oposisi, juga terdapat potensi ancaman serangan militer oleh AS dan sekutunya. Pemerintah harus siap dengan opsi evakuasi WNI, dan terdapat informasi bahwa WNI di Suriah secara bertahap telah mulai dievakuasi. Oleh sebab itu, penjelasan pemerintah mengenai proses evakuasi tersebut harus diketahui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal penting lainnya, upaya diplomasi melalui jalur parlemen juga perlu dilakukan, seperti melalui forum PUIC (*Parliamentary Union of the OIC Member States*), APA (*Asian Parliamentary Assembly*), dan IPU (*Inter-*

*Parliamentary Union*). Melalui fora antar-parlemen, Anggota DPR-RI dapat menjalin komunikasi dengan sesama anggota parlemen dari berbagai negara untuk turut mencari solusi damai dalam mengatasi konflik Suriah.

## Rujukan:

1. "Perundingan Berlanjut di AS," *Kompas*, 14 September 2013.
2. "AS-Rusia Sepakat," *Kompas*, 15 September 2013.
3. "Assad Terbukti Gunakan Senjata Kimia," *Suara Pembaruan*, 14-15 September 2013.
4. "Suriah Setujui Senjata Kimia Dimusnahkan," *Media Indonesia*, 14 September 2013.
5. "PBB: Assad setuju larangan senjata kimia," *Suara Pembaruan*, 13 September 2013.
6. "Barat Terus Tekan Assad," *Kompas*, 17 September 2013.
7. "Convincing Evidence of Syria chemical Attack: UN," *Jakarta Post*, 17 September 2013.
8. "Assad Tandatangani Pakta Antisenjata Kimia," *Republika*, 14 September 2013.
9. "PBB Desak Akses Kemanusiaan Untuk Suriah," *Republika*, 15 September 2013.
10. "PBB : Suriah Terbukti Gunakan Gas Sarin Skala Besar," *Suara Pembaruan*, 17 September 2013.
11. "Gas Attack data Point to Assad's Forces," *International Herald Tribune*, 19 September 2013.
12. "Barat dan Rusia Bersitegang," *Kompas*, 19 September 2013.
13. "Rusia Ragukan Temuan PBB," *Republika*, 19 September 2013.
14. "SBY Tolak Aksi Militer di Suriah," <http://www.voaindonesia.com/content>, diakses 19 September 2013.
15. "Menlu RI Kecam Penggunaan Senjata Kimia di Suriah," <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/27/ms657i>, diakses 27 Agustus 2013.
16. "Assad Minta Waktu Satu Tahun," *Kompas*, 20 September 2013.
17. "Rusia Perpanjang Nafas Assad," *Republika*, 20 September 2013.
18. "Assad Patuhi Kesepakatan," *Republika*, 20 September 2013.
19. "Churches Urged To Back Syria Peace Plan," *Jakarta Post*, 20 September 2013.
20. "Krisis Suriah Harus Diselesaikan dengan Proses Politik," *Kompas*, 25 September 2013.